

**DARI MONARKI ABSOLUT KE PEMERINTAHAN KONSTITUSIONAL: JEJAK  
MODERNISASI THAILAND**

**Rahma Fauziah<sup>1</sup>, Sevina Rahmawati<sup>2</sup>, Alya Rizkika Zahra<sup>3</sup>, Fatonah<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>**Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Jambi**

[rahmafauziah625@gmail.com](mailto:rahmafauziah625@gmail.com)<sup>1</sup>, [sevinarahma98@gmail.com](mailto:sevinarahma98@gmail.com)<sup>2</sup>, [alyarizkika86@gmail.com](mailto:alyarizkika86@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[fatonahnurdin@unja.ac.id](mailto:fatonahnurdin@unja.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstrak**

Proses modernisasi di Thailand, yang dimulai oleh Raja Mongkut dengan pengenalan pendidikan Barat, menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dampak modernisasi terhadap struktur pemerintahan dan tantangan nasionalisme yang muncul, khususnya di wilayah selatan yang mayoritas Muslim. Metode yang digunakan adalah studi literatur, yang mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memahami dinamika sejarah dan sosial yang terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun modernisasi telah meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, tantangan nasionalisme, terutama melalui gerakan separatis Muslim Patani, mencerminkan kebutuhan mendesak akan nasionalisme yang inklusif. Gerakan ini tidak hanya berfungsi sebagai perlawanan terhadap penindasan budaya, tetapi juga sebagai upaya untuk menegaskan hak-hak politik dan sosial masyarakat Patani dalam kerangka negara yang lebih adil dan beragam.

**Kata Kunci:** Modernisasi Thailand, Raja Mongkut, Nasionalisme, Gerakan Separatisme.

**Abstract**

*The process of modernization in Thailand, started by King Mongkut with the introduction of Western education, is the subject matter of this study. The purpose of the research is to analyze the impact of modernization on the structure of government and the challenges of nationalism that emerged, especially in the Muslim-majority southern region. The method used is a literature study, which collects data from various sources to understand the historical and social dynamics that occurred. The conclusion of this study shows that although modernization*

*has increased people's participation in governance, the challenge of nationalism, especially through the Patani Muslim separatist movement, reflects the urgent need for an inclusive nationalism. The movement serves not only as a resistance to cultural oppression, but also as an attempt to assert the political and social rights of the Patani people within the framework of a more just and diverse state.*

**Keywords:** *Modernization of Thailand, King Mongkut, Nationalism, Separatism Movement.*

## PENDAHULUAN

Proses modernisasi di Thailand dimulai oleh Raja Mongkut, yang dikenal sebagai perintis pelaksanaan pendidikan Barat. Ia memainkan peran penting dalam memperkenalkan pendidikan modern ke dalam sistem pendidikan tradisional Thailand. Hal ini merupakan langkah awal yang sangat fundamental dalam proses modernisasi bangsa. Masa pemerintahan Raja Chulalongkorn (1868–1910) merupakan titik balik penting dalam sejarah modernisasi Thailand. Ia melakukan pembaharuan besar-besaran dalam sistem pemerintahan, menghapus kekuasaan raja-raja lokal, dan mengentralisasi pemerintahan. Ini berimplikasi pada peningkatan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan percepatan demokratisasi. Pada masa pemerintahan Raja Prajadhipok (1925–1935), Thailand mengalami krisis ekonomi global yang berdampak buruk. Upaya pemerintah untuk mendapatkan bantuan internasional gagal, sehingga mereka melakukan restrukturisasi anggaran yang menyebabkan ketidakpuasan luas. Inilah yang mendorong kelompok revolusioner pimpinan Pridi Banomyong dan Phibun Songgram untuk melakukan kudeta tak berdarah pada tanggal 24 Juni 1932. Kudeta ini menandai transisi dari monarki absolut menuju pemerintahan konstitusional, mereformasi struktur pemerintahan dan mempromosikan demokrasi (Amalul, 2016)..

Saat ini, Thailand menghadapi tantangan nasionalisme, terutama di wilayah selatan yang merupakan mayoritas muslim. Gerakan separatis Muslim Patani merupakan tanggapan terhadap kebijakan nasionalisme yang cenderung menekankan homogenitas budaya dan identitas nasional yang eksklusif. Penggabungan wilayah Patani ke dalam Kerajaan Siam pada tahun 1909 telah menciptakan ketegangan yang mendalam, baik dalam hal pengakuan identitas maupun akses terhadap sumber daya dan layanan publik. Gerakan separatisme ini bukan hanya perlawanan bersenjata, tetapi juga upaya untuk menegaskan hak-hak politik dan sosial sebagai

kelompok minoritas, serta memperjuangkan otonomi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam metode penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah studi dalam bidang literatur. Literatur merupakan suatu metode dimana yang digunakan agar dapat mengumpulkan sumber dari data-data serta pola pengungkapan sebagai bahan pembahasan dalam penulisan artikel ini. Dan studi literature yang dilakukan ini juga melalui cara membaca serta mempelajari berbagai buku-buku bacaan baik itu di dalam jurnal-jurnal yang bersangkutan dan relevan yang bertujuan sebagai sumber utama yang berkaitan dengan suatu kajian sehingga dapat dilakukanlah analisis agar bisa mendapatkan hasil ide dan juga gagasan penulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Modernisasi Thailand**

Thailand melancarkan modernisasi di berbagai bidang, terutama politik dan militer. Tindakan yang pertama yaitu menghapus nama Siam pada tahun 1939 yang biasa digunakan banyak negara untuk menyebut Thailand atau Muangthai. Terdapat alasan penggantian nama tersebut karena Siam diartikan sebagai bangsa budak, sedangkan Muangthai berarti negerinya orang-orang bebas (Heri, 2016). Proses modernisasi Thailand dimulai oleh Raja Mongkut dan sekaligus sebagai perintis pelaksanaan pendidikan Barat. Mongkut inilah yang dikenal sebagai perintis modernisasi Muangthai. Modernisasi Thailand mencapai puncaknya pada masa pemerintahan raja Chulalongkorn (1868-1910). Adanya modernisasi, maka absolutisme perlahan demi perlahan ditinggalkan, rakyat semakin terlibat dalam pemerintahan serta demokrasi semakin dikibarkan. Pada masa pemerintahannya, ia melakukan pembaharuan secara besar-besaran. Ia mengorganisasikan pemerintahan dengan menghapus kekuasaan raja-raja lokal. Raja-raja itu diangkat menjadi pegawai negeri dan pemerintahan disentralkan (Kardiyat, 2012).

Pada masa pemerintahan Raja Prajadhipok (1925-1935) terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia, sehingga Thailand mengalami kesulitan keuangan. Pada masa krisis global, pemerintah mencoba mendapatkan bantuan dari Inggris dan Prancis namun gagal. Sebagai

tindakan alternatif, mereka mengurangi pegawai istana dari 3000 menjadi 300 orang dan melakukan rasionalisasi gaji bagi pegawai negeri dan militer, yang membuat banyak pihak kecewa. Meski demikian, uang yang tersedia digunakan untuk proyek-proyek yang berpihak rakyat seperti stasiun radio dan pangkalan udara Dong Muang. Namun, kelompok yang dipotong gajinya merasa terpukul, meningkatkan jumlah kalangan yang kecewa. Kelompok revolusioner pimpinan Pridi Banomyong dan Phibun Songgram, yang terdiri dari kaum intelektual Barat dan elite birokrasi, mulai tidak puas dengan kepemimpinan angkatan bersenjata yang lebih tua (Kardiyat, 2012). Mereka melakukan revolusi tak berdarah pada tanggal 24 Juni 1932 dengan dukungan militer. Kudeta 1932 atau revolusi 1932 merupakan peristiwa penting dalam sejarah Thailand yang menandai transisi dari monarki absolut menuju pemerintahan konstitusional. Revolusi ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor termasuk penurunan kekuasaan monarki di bawah Raja Prajadhipok (Raja VII), ketidakpuasan dari kalangan warga terdidik yang merasa kecewa dengan kondisi pemerintahan serta kebijakan ekonomi yang merugikan seperti pemotongan anggaran gaji untuk militer dan pegawai negeri yang ditetapkan oleh raja. Ketidakpuasan ini mendorong sekelompok militer dan sipil yang dikenal sebagai Khana Ratsado (Partai Rakyat) untuk bertindak (Galan, 2014).

Pada tanggal 21 Juni 1932, sekelompok 46 personel militer dan 65 warga sipil berhasil melancarkan kudeta yang menggulingkan monarki absolut. Mereka meminta Raja Prajadhipok untuk menyetujui pembentukan pemerintahan konstitusional (Nagari & Fitra, 2022). Revolusi ini didorong oleh keinginan untuk demokrasi dan pemerintahan yang lebih adil bagi rakyat. Revolusi 1932 berhasil mengubah struktur pemerintahan Thailand, mengakhiri kekuasaan absolut raja dan memulai era baru pemerintahan konstitusional.

### **Perkembangan Nasionalisme Thailand**

Saat ini, Thailand menghadapi tantangan nasionalisme, terutama di wilayah selatan yang merupakan mayoritas muslim. Masyarakat muslim merupakan penduduk asli yang berada di Pattani (Thailand selatan). Gerakan separatisme Muslim Patani dapat dipahami sebagai respons terhadap kebijakan nasionalisme Thailand yang cenderung menekankan homogenitas budaya dan identitas nasional yang eksklusif. Sejak penggabungan wilayah Patani ke dalam kerajaan Siam pada tahun 1909, masyarakat Patani, yang mayoritas beragama Islam dan memiliki akar budaya Melayu, telah mengalami berbagai bentuk penindasan. Kebijakan asimilasi yang

diterapkan oleh pemerintah Thailand, termasuk penghapusan bahasa Melayu dari sistem pendidikan dan pengenalan budaya Thai sebagai norma, telah menciptakan ketegangan yang mendalam. Masyarakat Patani merasa terasing dan terpinggirkan, tidak hanya dalam hal pengakuan identitas, tetapi juga dalam akses terhadap sumber daya dan layanan publik. Penindasan ini memicu munculnya gerakan perlawanan yang berusaha untuk mengembalikan hak-hak mereka dan menegaskan kembali identitas kultural yang telah terancam, menjadikan gerakan ini sebagai simbol perjuangan untuk mempertahankan warisan budaya mereka (Rudolf, 2005).

Gerakan separatisme Muslim Patani tidak hanya sekadar perlawanan bersenjata, tetapi juga merupakan upaya untuk menegaskan hak-hak politik dan sosial mereka sebagai kelompok minoritas. Masyarakat Patani berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan otonomi dalam kerangka negara yang lebih inklusif, di mana keberagaman budaya dan agama dihargai. Ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah yang bersifat sentralistik dan diskriminatif telah mendorong mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk hak untuk mengatur urusan lokal dan melestarikan tradisi serta praktik keagamaan mereka (Grace, Nelmidia, & Dkk., 2019). Dalam hal ini, gerakan separatisme menjadi wadah bagi masyarakat Patani untuk mengekspresikan aspirasi mereka dan menuntut keadilan sosial serta politik.

Gerakan ini mencerminkan tantangan bagi nasionalisme Thailand yang harus beradaptasi dengan realitas sosial yang majemuk. Ketidakpuasan yang terus berkembang terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sensitif terhadap perbedaan budaya menunjukkan bahwa nasionalisme yang tidak mampu mengakomodasi keberagaman dapat berujung pada konflik berkepanjangan. Masyarakat Patani, dengan sejarah dan identitas yang kaya, menuntut agar pemerintah Thailand tidak hanya mengakui keberadaan mereka, tetapi juga memberikan ruang bagi otonomi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Mania, 2019). Dalam konteks ini, gerakan separatisme menjadi panggilan untuk dialog yang lebih konstruktif mengenai keberagaman dalam masyarakat Thailand.

Pada akhirnya, gerakan separatisme Muslim Patani menegaskan pentingnya membangun nasionalisme yang inklusif dan menghargai perbedaan. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Thailand dihadapkan pada pilihan untuk membuka ruang dialog dan memberikan otonomi yang lebih besar kepada masyarakat Patani, atau terus menerapkan kebijakan yang bersifat represif yang hanya akan memperburuk ketegangan. Dengan mengakui hak-hak dan

aspirasi masyarakat Patani, Thailand dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan, di mana semua etnis dan agama dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati. Gerakan ini, dengan demikian, bukan hanya sekadar perjuangan untuk kemerdekaan, tetapi juga merupakan upaya untuk menciptakan identitas nasional yang lebih kaya dan beragam, yang mencerminkan realitas sosial yang kompleks di Thailand (Winna & Jun, 2012).

## KESIMPULAN

Proses modernisasi di Thailand dimulai pada era Raja Mongkut, yang memperkenalkan pendidikan Barat dan mengawali transformasi sistem pendidikan tradisional. Langkah ini menjadi fondasi bagi perubahan yang lebih besar, terutama pada masa pemerintahan Raja Chulalongkorn, yang menghapus kekuasaan raja-raja lokal dan mengentralisasi pemerintahan. Reformasi ini tidak hanya memperkuat struktur pemerintahan, tetapi juga meningkatkan partisipasi rakyat dalam politik, yang menjadi langkah penting menuju demokratisasi. Namun, tantangan muncul ketika Raja Prajadhipok menghadapi krisis ekonomi global yang memicu ketidakpuasan dan akhirnya mendorong terjadinya kudeta tak berdarah pada tahun 1932, menandai transisi dari monarki absolut ke pemerintahan konstitusional.

Di tengah kemajuan modernisasi, Thailand kini menghadapi tantangan nasionalisme, terutama di wilayah selatan yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Gerakan separatis Muslim Patani muncul sebagai respons terhadap kebijakan nasionalisme yang cenderung menekankan homogenitas budaya. Sejak penggabungan wilayah Patani ke dalam Kerajaan Siam pada tahun 1909, masyarakat Patani mengalami penindasan dan marginalisasi. Kebijakan asimilasi yang diterapkan pemerintah, seperti penghapusan bahasa Melayu dan pengenalan budaya Thai, telah menciptakan ketegangan sosial yang mendalam. Dalam konteks ini, gerakan separatisme tidak hanya merupakan perlawanan bersenjata tetapi juga upaya untuk menegaskan hak-hak politik dan sosial mereka sebagai kelompok minoritas.

Gerakan separatisme Muslim Patani mencerminkan kebutuhan mendesak untuk membangun nasionalisme yang inklusif di Thailand. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang diskriminatif menunjukkan bahwa nasionalisme yang tidak mampu menghargai keberagaman dapat berujung pada konflik berkepanjangan. Untuk mencapai masyarakat yang harmonis dan adil, pemerintah Thailand perlu membuka ruang dialog dengan

masyarakat Patani dan memberikan otonomi lebih besar. Dengan mengakui hak-hak dan aspirasi masyarakat Patani, Thailand dapat bergerak menuju identitas nasional yang lebih kaya dan beragam, menciptakan masyarakat yang saling menghormati di tengah kompleksitas sosialnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalul, A. R. (2016). *Keterlibatan Private Private Military (Vinnell Corporation) Dalam kerjasama Militer Amerika Serikat-Arab Saudi Untuk Mendemokrasikan Haras Al Watani As-Suudiyah/Sang (Saudi Arabia National Guard)*. 18.
- Galan, P. S. (2014). The Path of Military Power Interference in the Politics of Thailand. *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, 1(1), 79–86.
- Grace, H. M., Nelmidia, & Dkk. (2019). Islam Datang dan Menetap di Thailand. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(9).
- Heri, S. (2016). Kolonialisme dan Identitas Kebangsaan Negara-negara Asia Tenggara. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 10(2), 151–152.
- Kardiyat, W. A. (2012). *Sejarah Asia Tenggara: Dari Awal Tumbuhnya Nasionalisme Sampai Terbangunnya Kerja Sama ASEAN*. Yogyakarta: Senata Dharma University Press.
- Mania. (2019). Perkembangan sosial Islam di Thailand. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 1(1).
- Nagari, Y., & Fitra, S. D. (2022). Gerakan Melawan Hukum Monarki Di Thailand. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(2), 69–73.
- Rudolf, Y. P. (2005). Minoritas Muslim Thailand. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 7(1).
- Winna, E., & Jun, J. (2012). Status Hukum Barisan Revolusi Nasional dalam Konflik Bersenjata di Thailand Selatan. *TerAs LAW REVIEW: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 3(2).